

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN MADRASAH (TINGKAT MTS DAN MA)

Alfi Sukrina ^{*1}

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

alfisukrina59@gmail.com

Nur 'Azizah

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

izah.mn1@gmail.com

Cipto Halomoan

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Darul Ilmi

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Abstract

The aim of this research is to examine what madrasa management (MTS and MA levels) must be regulated by school principals based on literature. This research uses the literature study method. Data sources are taken from trusted sources such as books, journal articles and documents that discuss the performance of school principals in leadership. The research results obtained are that a school is a leader in an educational unit, therefore a leader has functions and duties in carrying out tasks that function as first, a medium for achieving organizational goals and, influencing or motivating other parties. The main aim of leadership is to influence or motivate other people/parties to become actively involved in the organization's working mechanisms, so that leadership can be said to be successful if it is able to influence and motivate other people or parties to jointly achieve the stated organizational goals. In managing madrasahs, school principals are also regulated by law.

Keywords:. Leadership, Management, Education

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengelolaan madrasah (Tingkat MTS dan MA) apa saja yang mesti di atur oleh kepala sekolah secara literatur. Penelitian ini menggunakan metode Study Kepustakaan. Sumber data diambil dari sumber-sumber terpercaya seperti dari buku, jurnal artikel dan dokumen yang membahas kinerja kepala sekolah dalam kepemimpinan. Adapun hasil

¹ Korespondensi Penulis

penelitian yang didapatkan adalah Kepada sekolah ialah seorang pemimpin disuatu satuan pendidikan, maka dari itu seorang pemimpin memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan tugas yang berfungsi sebagai pertama, media untuk mencapai tujuan organisasi dan, mempengaruhi atau memotivasi pihak lain. Tujuan utama sebuah kepemimpinan adalah mempengaruhi atau memotivasi orang / pihak lain untuk ikut terlibat aktif dalam mekanisme kerja organisasi, sehingga dikatakan berhasil sebuah kepemimpinan jika telah mampu mempengaruhi dan memotivasi orang atau pihak lain untuk bersama - bersama mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam mengelola madrasah, kepala sekolah juga sudah diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci : *Kepemimpinan, Pengelolaan, Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 telah menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha wsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Merealisasikan manusia indonesia yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut pada hakikatnya diwujudkan dalam pendidikan berbasis agama. Pendidikan tersebut bisa dilaksanakan dengan formal maupun non formal. Pendidikan agama yang diperoleh secara formal bisa dalam bentuk pengajaran agama. Sejalan dengan hal ini, maka dalam proses pendidikan agama juga memerlukan manajemen dalam sistem pengelolaannya. Hal ini juga merupakan sebagai upaya dalam rangka memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan. Peran manajemen adalah dalam rangka menjaga agar usaha dalam mencapai tujuan tersebut menjadi efektif dan efisien. Sebagai seorang pimpinan, kepala madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap meningkatkan pengelolaan rumah tangganya.

Manajemen kepala sekolah merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan sebuah keberhasilan sekolah. Seorang kepala sekolah yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola semua aspek sekolah, mulai dari pengelolaan SDM, pengambilan keputusan hingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu teori yang sering dikaitkan dengan kepala sekolah adalah teori transformasional kepemimpinan.

Teori transformasional kepemimpinan mengemukakan bahwa kepala sekolah yang efektif adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotifasi para guru dan staf sekolah untuk mencapai tujuan bersama (Bass and Avolio, 1994: 23). Dalam konteks kepemimpinan kepala sekolah, teori ini menekankan pada pentingnya kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain secara positif dan membawa perubahan secara signifikan dalam organisasi. Dengan kata lain,

pemimpin diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, inovatif dan penuh semangat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memperbaiki maupun pengembangan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan tuntutan zaman. Sejalan dengan era reformasi, maka lahirlah UU No 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah yang berisi tentang kewenangan sekolah yang menuntut adanya perubahan dan penyesian sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, melirik kepada kebrangaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin mempunyai kebijakan agar bisa menjalankan kepemimpinannya dengan lancar terlebih untuk pengelolaan satuan pendidikan baik MA atau MTS. Pandangan Islam teradap lembaga pendidikan juga harus bisa membawa implikasi bahwa seandainya manusia tidak memperoleh pendidikan, maka dengan sendirinya ia akan menjadi baik, karena Allah telah memberikan potensi fitrah padanya sejak lahir. Tetapi, seandainya manusia memperoleh pendidikan dan aspek pendidikan menjadi faktor penentu apakah manusia tersebut menjadi baik atau jahat.

Pendidikan Islam akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di era globalisasi dengan baik sepanjang ia telah memiliki landasan filsafat yang jelas tentang konsep manusia. Lembaga pendidikan yang bermutu menurut tim whole district development adalah 1) visi dan misi yang jelas 2) kepala sekolah yang profesional 3) guru yang profesional 4) lingkungan belajar yang kondusif 5) ramah siswa 6) manajemen yang kuat 7) kurikulum yang luas dan berimbang 8) penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna 9) pelibatan masyarakat yang tinggi.

Purwanti, Murniati dan Yusrizal dalam Muh. Fitrah menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai kunci pendorong bagi perkembangan dan kemajuan sekolah serta bertanggungjawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan programnya. Agar hal demikian tercapai dengan baik, maka kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan, sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. Kepala sekolah harus pandai memimpin kelompok dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Bercermin pada penjelasan tersebut, maka kepala sekolah mendapat tuntutan peran yang sangat besar. Dia harus kuat dan memiliki gaya kepemimpinan yang kuat untuk mendorong seluruh gurunya bekerja total dalam mendidik siswa-siswinya, memiliki visi untuk kemajuan sekolah, konsisten dengan visinya, tapi tetap demokratis dan menghargai pandangan para staf. Kepala sekolah juga harus memiliki ekspektasi yang baik pada para siswanya, memberikan penguatan keterampilan dasar untuk siswa-siswinya, sehingga bisa berkembang dengan baik dalam profesi apapun, dan mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk para guru dan karyawan serta menciptakan suasana yang nyaman untuk siswa (Rosyada, 2013)

Dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini tidak berhasil. *Pertama*, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan materi ajar dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis sekolah akan dapat menghasilkan *output* yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri (Hanushek, 1981). *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat sekolah (Muh. Fitrah, 2017).

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan madrasah (Tingkat MTS dan MA) apa saja yang mesti diatur oleh kepala sekolah melalui kepemimpinannya secara literatur. Sehingga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan terkait kinerja seorang kepala sekolah dalam memimpin satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Study Kepustakaan. Sumber data diambil dari sumber-sumber terpercaya seperti dari buku, jurnal artikel dan dokumen yang membahas kinerja kepala sekolah dalam kepemimpinan. Dalam mengumpulkan data penulis mengumpulkan jurnal atau artikel serta bahan bacaan yang membahas terkait kepemimpinan kepala sekolah dan pengelolaan satuan pendidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif* dengan melakukan tindakan menganalisis data yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepada sekolah ialah seorang pemimpin disuatu satuan pendidikan, maka dari itu seorang pemimpin memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan tugas. Adapun fungsi seorang pemimpin adalah sebagaimana yang menyebutkan secara operasional fungsi kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi lima fungsi pokok, yaitu: *Pertama*, Fungsi Intruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator, pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah tersebut dilaksanakan agar keputusan dapat dikerjakan secara efektif. *Keduan*, Fungsi Konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi antar dua arah. Pada tahap pertama, usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan dari orang-orang yang dipimpinnya yang memiliki berbagai informasi dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya adalah konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam

pelaksanaan. *Ketiga*, Fungsi Partisipasi. Pada fungsi ini pemimpi berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. *Keempat*, Fungsi Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa melalui persetujuan dari pemimpin. *Kelima*, Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah (Sitti Qurratul A'yuni dan Radial Hijrawan, 2020 :74).

Rahman Afandi (2013) menyebutkan fungsi pemimpin adalah : *pertama* sebagai task related atau problem Solving Function, artinya bahwa pemimpin memberikan saran dan pemecahan masalah serta dapat memberikan sumbangan informasi dan pendapat. *Kedua* sebagai group maintenance function atau social function yang mencakup: membantu kelompok agar dapat beroperasi secara lancar, memberikan persetujuan atau melengkapi anggota kelompok lain.

Adapun menurut Istikomah dan Budi Haryanto (2021) menyebutkan fungsi kepemimpinan adalah: *pertama*, media untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya kepemimpinan maka akan memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi, yang dalam hal ini ketecapaiannya tujuan pendidikan agama islam. *Kedua*, mempengaruhi atau memotivasi pihak lain. Tujuan utama sebuah kepemimpinan adalah mempengaruhi atau memotivasi orang / pihak lain untuk ikut terlibat aktif dalam mekanisme kerja organisasi, sehingga dikatakan berhasil sebuah kepemimpinan jika telah mampu mempengaruhi dan memotivasi orang atau pihak lain untuk bersama - bersama mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selain dari fungsi kepemimpinan kepala sekolah di satuan pendidikan, juga ada tugas pokok seorang pemimpin kepala sekolah yang disebutkan oleh rahman afandi Dalam Richard H. Hall, Wahjosumidjo (2013) : *pertama*, mendefinisikan misi dan peranan organisasi (involves the definition of the institutional organizational mission and role). *Kedua*, menegakan tujuan organisasi (the institutional embodiment of purpose). *Ketiga*, mempertahankan keutuhan organisasi (to defend the organization's integration). *Keempat*, mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi (the ordering of internal conflict). Baik fungsi kepemimpinan yang dikemukakan oleh stoner maupun hall, keduanya menitik beratkan pada fungsi manajemen. Dalam kerangka fungsi manajemen ini, legitimasi seorang pemimpin tidak diukur atau lebih tepatnya tidak bersumber dari kemampuannya mendapatkan simpati atau dukungan dari bawahan, melainkan lebih pada sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengatur dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin serta kemampuan mendelegasikan tugas-tugas tersebut secara tepat kepada bawahannya.

Sedangkan menurut James A. F. Stoner dalam Sitti Qurratul A'yuni dan Radial Hijrawan, (2020) menyebutkan tugas pokok pemimpin adalah, pemimpin bekerja dengan orang lain, pemimpin tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan

(akuntabilitas), pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, pemimpin berfikir secara analitis dan konseptual, pemimpin harus mampu menjadi seorang mediator (penengah) , pemimpin adalah politis dan diplomatik. seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. sebagai seorang diplomasi seorang pemimpin harus dapat mewakili organisasinya, pemimpin membuat keputusan yang sulit dan harus bisa memecahkan masalah.

Berdasarkan literatur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak pendapat yang saling menyampaikan pendapat terkait fungsi dan tugas kepemimpinan kepala sekolah diantaranya kepemimpinan kepala sekolah berfungsi untuk sebagai seorang intruksi atau yang mengarahkan guru-guru atau karyawan satuan pendidikan untuk menjalankan tugas masing-masing dengan profesional untuk mencapai visi dan misi lembaga satuan pendidikan. Sedangkan tugas pokok kepemimpinan kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berperan aktif dalam menggerakkan rekan kerja untuk menjabai visi dan misi satuan pendidikan serta mengarahkan rekan kerja jika terjadi satu permasalahan.

Konsep Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pengelolaan Satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk meng-cover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah (Edward Sallis, 2014).

Umar Umar dan Hendra Hendra (2020) menyebutkan Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan diatur oleh pasal 49 dan pasal 50 sebagai berikut: 1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis di sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.2) Pengelolaan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 3) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. 4) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan pendidikan SMP/ MTS/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. 5) Pada satuan pendidikan, SMA/MA/SMALB/SMK/bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang secara berturut turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, dan kesiswaan.

Menurut Engkoswara dan Aan Komariah (2010:294) menyatakan bahwa esensi dari Manajemen Berbasis Sekolah adalah terjadinya otonomi, pemberdayaan, transparansi, kemandirian, dan fleksibilitas manajemen pada tingkat sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif, efektif, dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pengelolaan satuan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh pemerintah yang diatur oleh UU. Dalam hal ini sebuah lembaga sekolah, yang diharapkan menjadi keberhasilan dari cita-cita bangsa yang bersumber dari system pendidikan nasional.

Standar Pengelolaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (Menengah)

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tanggal 23 Mei 2007, berisikan tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pertama mengenai Perencanaan Program, Visi Sekolah/Madrasah. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya, dari visi sekolah/Madrasah, dapat dijadikan acuan, sebagai berikut : a) Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; b) Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; c) Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional d) Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memerhatikan masukan komite sekolah/madrasah.

Misi Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya, dari misi sekolah/madrasah dapat dirumuskan sebagai berikut : a) Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; b) Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; b) Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; c) Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah (Nursalim, 2016)

Kedua, Tujuan Sekolah/Madrasah. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya, dari tujuan sekolah/madrasah dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan) b) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; c) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah; d) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah (Asbin, Pasaribu, 2017).

Ketiga, Rencana Kerja Sekolah/Madrasah. Pelaksanaan Rencana Kerja, meliputi beberapa hal sebagai berikut : a) Pedoman Sekolah/Madrasah. b) Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah. c) Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah. d) Bidang Kesiswaan. E) Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran. Hal ini mencakup pada kurikulum tiga belas dan kurikulum merdeka, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik. f) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. g) Bidang Sarana dan Prasarana. h) Bidang Keuangan dan Pembiayaan. i) Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah. j) Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah.

Keempat, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini mencakup kedalam program pengawasan. Dimana pada program ini sekolah/madrasah menyusun program pengawasan secara objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian evaluasi diri dimana sekolah/madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah, kemudian evaluasi dan pengembangan kurikulum. Dimana proses evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan secara komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Kemudian evaluasi pendayagunaan, dimana evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah akreditasi sekolah/madrasah. Dimana sekolah/madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, Kepemimpinan Sekolah/Madrasah. dimana hal ini mencakup kedalam: Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah, Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah, Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri.

Keenam, Sistem Informasi Manajemen. Dimana Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketujuh yaitu Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI, yang didukung oleh standar-standar: Pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian (Ari Hasan Anshori, 2017)

Kedelapan, Bidang-bidang kegiatan pengelolaan sekolah. Pengelolaan ini mencakup kepada Pengelolaan program pengajaran, Pengelolaan Kesiswaan, Pengelolaan Personil Sekolah, Pengelolaan keuangan, peralatan, perlengkapan, dan Gedung Sekolah dan Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.

Pengelolaan program pengajaran di Indonesia mulai dari TK/SD sampai SMA sederajat telah disusun oleh para ahli dari Departemen yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Pengajaran berdasarkan GBPP itu sekolah yang bersangkutan dan para gurunya diberi tugas mengajar mata-mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu untuk selama satu tahun. Sedangkan Pengelolaan Kesiswaan, Sekolah harus mengetahui dan memahami perbedaan individu anak, mengetahui kebutuhannya, minatnya, mengetahui cita-citanya. Pengelolaan Personil Sekolah yaitu Warga sekolah terdiri dari siswa, guru, personil tata usaha, orang tua siswa dan anggota masyarakat yang berminat pada pendidikan. Kemudian Pengelolaan keuangan, peralatan, perlengkapan, dan Gedung Sekolah yaitu Sumber keuangan sekolah ada dua macam, dari pemerintah dan nonpemerintah. Keuangan dari pemerintah yaitu dari uang rutin dan uang pembangunan, sedangkan keuangan dari nonpemerintah yaitu SPP dan sumbangan dari orang tua dan masyarakat, baik melalui BP3 sekolah, prosedur penggunaan keuangan dan pertanggungjawaban. dan terakhir Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dimana Keberadaan sekolah adalah didorong oleh kebutuhan masyarakat, karena itu tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan pemerintah

Kesembilan, Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan pengamatan atas kualitas dari pelayanan yang kita berikan. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program (Aswinta, Ketaren,dkk, 2022)

Sistem dan Standar Pengelolaan Madrasah Aliyah

Madrasah aliyah adalah suatu pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ke khasan agama Islam pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari madrasah pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs (Kemenag, Perda. 2015)

Hal yang berkaitan dengan pengelolaan madrasah adalah sebagai berikut: a) Aspek Pengelolaan Proses belajar Mengajar Proses belajar merupakan kegiatan utama madrasah. Madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di madrasah. b) Aspek Pengelolaan Proses belajar Mengajar Proses belajar merupakan kegiatan utama madrasah. Madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-teknik

pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di madrasah. c) Aspek Pengelolaan Proses belajar Mengajar Proses belajar merupakan kegiatan utama madrasah. Madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumberdaya yang tersedia di madrasah. d) Perencanaan dan Evaluasi Madrasah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (school-based plan). Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu madrasah. e) Pengelolaan Kurikulum Komponen yang sangat penting untuk menuju pendidikan yang berkualitas itu adalah adanya kurikulum madrasah yang dibuat oleh madrasah sebagai sebuah pedoman dan arah dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Karena kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional.

Sementara kondisi madrasah pada umumnya sangat beragam maka dalam implementasinya, madrasah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi) kurikulum tersebut, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. f) Pengelolaan Ketenagaan Kepala Madrasah perlu melakukan pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan sanksi (reward and punishment), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah (guru, tenaga administrasi, laporan, dsb) dapat dilakukan oleh madrasah kecuali yang menyangkut pengupahan/imbalan jasa dan rekrutmen guru, yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. g) Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan) Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh madrasah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. h) Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepatutnya dilakukan oleh Kepala Madrasah secara transparan dan bertanggungjawab. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa madrasahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke madrasah. Madrasah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. i) Pelayanan Siswa Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan madrasah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. j)

Hubungan Madrasah Masyarakat Esensi hubungan madrasah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial. Dalam arti yang sebenarnya hubungan madrasah-masyarakat dari dahulu sudah didesentralisasikan. Oleh karena itu, sekali lagi, yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstesitas hubungan madrasah- masyarakat. k) Pengelolaan Iklim Madrasah Iklim madrasah (fisik dan non fisik) yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan madrasah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan/ekspektasi yang tinggi dari warga madrasah, kesehatan madrasah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student- centered activities) adalah contoh-contoh iklim madrasah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa (Imam Turmidzi, 2021).

Adapun standar Pengelolaan Madrasah Aliyah di atur dalam aturan berikut : Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007, mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kedua, PP nomor 19 tahun 2005 yang berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Ketiga, Pasal 51 UU nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis madrasah. keempat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Madrasah yang telah melakukan pengelolaan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini khususnya PP Nomor 13 tahun 2015 dan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 ini berarti telah melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (Ansor Anwar, 2017).

KESIMPULAN

Kepada sekolah ialah seorang pemimpin disuatu satuan pendidikan, maka dari itu seorang pemimpin memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan tugas yang berfungsi sebagai *pertama*, media untuk mencapai tujuan organisasi dan, mempengaruhi atau memotivasi pihak lain. Tujuan utama sebuah kepemimpinan adalah mempengaruhi atau memotivasi orang / pihak lain untuk ikut terlibat aktif dalam mekanisme kerja organisasi, sehingga dikatakan berhasil sebuah kepemimpinan jika telah mampu mempengaruhi dan memotivasi orang atau pihak lain untuk bersama - bersama mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam mengelola madrasah, kepala sekolah juga sudah diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Hasan Anshori, "Pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah Dalam Kepemimpinan Sekolah/Madrasah Efektif," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 2, no. 01 (2017): 23–38.
- Asbin Pasaribu, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, No. 1 (25 April 2017), <https://doi.org/10.30596/EduTech.V3i1.984>.
- Aswinta Ketaren dkk., "Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Pada Satuan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (10 Desember 2022): 10340–43, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10030>.
- Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (Routledge, 2014).
- Hensor Anwar, "Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta," *Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2017): 22–23.
- Nursalim Nursalim, "Problematisasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007)," *Millah: Journal Of Religious Studies*, 2016, 113–26, <https://doi.org/10.20885/Millah.Vol16.Iss1.Art6>.
- Radia, Hijrawan. 2021. Hadist Tematik: Manajemen Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Saliha* 4 (1)
- Rahman, Afandi. 2013. Kependidikan dalam Pendidikan Islam. *Insania* 18 (1)
- Siti, Qurrotul A'yun dan Radia, Hijrawan. 2020. Analisis Kritis Kepemimpinan Pendidikan Islam Berdasarkan Syarat Dan Ciri-Ciri Kepemimpinan Yang Ideal. *Al-Fahim* 2(2)
- Turmidzi, Imam. "Pengelolaan Pendidikan Bermutu Di Madrasah." *Tarbawi* 4, no. 2 (2021).
- Umar Umar Dan Hendra Hendra, "Konsep Dasar Pengelolaan Kelas Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah," *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 18, No. 1 (4 Agustus 2020): 99–112, <https://doi.org/10.52266/Kreatif.V18i1.365>.